

Lampiran I Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB
Nomor : 35A/MWA-IPB/2005
Tanggal : 18 Oktober 2005
Tentang : Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
 Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2005

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2005 (RKAT 2005) disusun menggunakan prinsip keseimbangan antara Rencana Anggaran Belanja dengan Rencana Pendapatan. Berdasarkan prinsip keseimbangan tersebut maka realisasi belanja kegiatan disesuaikan dengan realisasi pendapatan. Namun, apabila ada keperluan pendidikan yang harus dibiayai padahal dana tidak tersedia pada tahun yang bersangkutan maka dana dapat diambilkan dari posisi kas akhir tahun sebelumnya. Sebaliknya, pendapatan tahun berjalan dapat ditabung dalam bentuk peningkatan posisi kas akhir tahun untuk dicadangkan bagi keperluan tahun berikutnya.

Sumber pendapatan IPB terdiri dari APBN atau Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat (DM). Pendapatan dari Pemerintah berupa : (1) dana yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB, dan (2) dana yang diperoleh dari DIPA Departemen Pendidikan Nasional. Dana Masyarakat yang diperoleh IPB berupa (1) dana SPP, (2) dana Non SPP baik berasal dari mahasiswa, masyarakat maupun usaha penunjang, (3) dana hasil kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat baik dari instansi pemerintah maupun swasta, dan (4) dana hasil usaha komersial.

Anggaran pendapatan yang berasal dari pemerintah dapat dikelompokkan menjadi Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi (eks. Anggaran Pembangunan IPB), dan Anggaran Administrasi Umum (eks. Anggaran Rutin IPB). Anggaran Administrasi Umum diperuntukkan bagi belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, pemeliharaan gedung, belanja investasi alat dan buku/jurnal, beasiswa, dan belanja barang dan pegawai yang *exclusive* dalam paket-paket kegiatan. Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi sebagian besar merupakan belanja investasi, yaitu belanja peralatan pendidikan, pembangunan gedung pendidikan. Anggaran belanja yang berasal dari pemerintah yang sifatnya tambahan termasuk juga anggaran belanja untuk pengembangan departemen dan unit-unit penunjang akademik melalui anggaran pendapatan hibah kompetitif SP4, DUE-like, Program A dan B. Rencana Pendapatan yang berasal dari Pemerintah didasarkan pada Pagu Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga angka maksimum realisasi pendapatan dari pemerintah adalah sama dengan pagu. Belanja kegiatan yang menggunakan sumber pendapatan dari pemerintah bersifat terikat (*restricted*). Dana dari pemerintah tidak dapat dialihkan untuk belanja di luar yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, efisiensi hanya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan volume kegiatan yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan Dana dari Pemerintah, realisasi Pendapatan dari Dana Masyarakat sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan IPB untuk merealisasikan rencana tersebut dan berbagai faktor eksternal terkait. Pendapatan yang berasal dari Dana Masyarakat terdiri dari dana yang bersifat *restricted* dan dana yang bersifat *unrestricted*. Dana yang bersifat *restricted* terdiri dari pendapatan berbentuk Uang Asrama Mahasiswa TPB, Deposit Asrama TPB, PPKM S-0, S-1, S-2/3, dan Dana Abadi, serta dana kerjasama dengan mitra IPB dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pemberdayaan masyarakat. Pendapatan selain dari sumber-sumber tersebut pada dasarnya bersifat *unrestricted*.

Pada tahun 2005, realisasi pendapatan IPB dari Pemerintah diharapkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka dalam RKAT 2005. Hal ini karena disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas kampus yang sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Karena kondisi eksternal yang belum kondusif bagi pengembangan usaha komersial maka realisasi pendapatan dari usaha komersial sangat jauh di bawah target. Selain itu, pendapatan dana SPP dari program pasca sarjana juga di bawah target. Rendahnya pencapaian rencana pendapatan juga dibarengi dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan BBM dan harga-harga, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut maka RKAT 2005 perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. RKAT 2005 (Revisi) akan menjadi pedoman dalam alokasi anggaran pada bulan-bulan terakhir tahun 2005 ini sehingga secara keseluruhan akan menjadi landasan pencapaian kinerja institut dalam tahun 2005.

II. REVISI RENCANA KERJA

Pada umumnya, Rencana Kerja yang tercantum dalam dokumen RKAT 2005 semula tidak mengalami perubahan yang mendasar, namun suatu penyempurnaan dilakukan untuk mempertajam dan mempermudah pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan pada masing-masing bidang. Berikut ini disajikan uraian kegiatan pada masing-masing bidang tersebut.

1. Peningkatan Kualitas Manajemen Institusi

- a. Penyempurnaan organisasi departemen-fakultas berdasarkan pada mandat baru telah ditetapkan untuk mendukung penguatan desentralisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penetapan penanggungjawab program sarjana *passing out*, sehingga kelangsungan program pendidikan tersebut sampai tuntas dapat terjamin.
- c. Revitalisasi dan penguatan UPT Kebun Percobaan sehingga dapat menjadi unit pendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, disamping membangun kemampuannya membiayai kegiatan sendiri.

- d. Pembentukan Direktorat Program Diploma dan penyelenggaraan program diploma yang lebih sesuai dengan falsafah pendidikan vokasi dan lebih terkelola dengan baik.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Promosi program pendidikan untuk meningkatkan jumlah calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik.
- b. Pelaksanaan pendidikan dan administrasinya bagi mahasiswa program sarjana, diploma, magister, dan doktor.
- c. Pengkajian dan pengembangan kurikulum serta perbaikan metode pengajaran antara lain melalui Program Hibah Kompetitif (PHK).
- d. Penambahan jumlah koleksi buku teks dan jurnal ilmiah untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan.
- e. Peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen.
- f. Pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa dan pengembangan penalaran mahasiswa.
- g. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM) dan penyediaan asrama.
- h. Implementasi Sistem Jaminan Mutu Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan .
- i. Penyusunan proposal pengembangan departemen dan pengembangan institusi penunjang akademik serta pendampingan dan penyempurnaannya untuk memperoleh dana Program Hibah Kompetitif (PHK) SP4, A2, A3 dan B.

3. Peningkatan Kualitas Penelitian

- a. Pengembangan kegiatan penelitian yang dapat secara cepat diaplikasikan oleh masyarakat melalui penyusunan program penelitian payung IPB
- b. Pengembangan kerjasama penelitian dengan mitra di dalam dan luar negeri untuk membangun sinergi bagi tercapainya tujuan penelitian.
- c. Pengembangan sistem perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual masyarakat IPB.

4. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelaksanaan kegiatan kerjasama pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kontribusi IPB dalam pembangunan masyarakat.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama pemberdayaan masyarakat.

5. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Manusia

- a. Penerimaan dosen dan tenaga penunjang baru dalam status CPNS sebagai upaya darurat mengingat penerimaan pegawai IPB belum juga dapat dilakukan karena belum adanya skema *block grant*.
- b. Peningkatan disiplin pegawai dengan sistem pencatatan kehadiran tenaga penunjang menggunakan *bar code/finger print*.
- c. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan adanya asuransi kesehatan tambahan untuk seluruh PNS IPB, selain Askes yang berlaku secara nasional untuk PNS.

6. Peningkatan Manajemen Keuangan

- a. Penerapan mekanisme pembayaran dana dari Direktorat Keuangan ke fakultas/ departemen/unit kerja melalui sistem *petty cash*.
- b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keuangan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam manajemen keuangan.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan IPB sebagai BHMN berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (untuk organisasi nir-laba).

7. Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur

- a. Penyusunan jadwal terpadu untuk kuliah dan praktikum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas akademik di Kampus Darmaga.
- b. Pemindahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) dengan departemen-departemennya secara bertahap sehingga menjadi satu lokasi dengan fakultas-fakultas lain di Kampus Darmaga untuk menyongsong pelaksanaan kurikulum mayor-minor.
- c. Perbaikan gedung perpustakaan, ruangan kuliah, laboratorium, bengkel, rumah kaca serta fasilitas akademik lainnya.
- d. Perbaikan sarana air bersih, jalan, dan sarana pendukung untuk pengembangan sistem transportasi sepeda di dalam kampus.
- e. Perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan penanggulangan kerusakan fasilitas dan infrastruktur.

8. Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi

- a. Pengembangan *Local Area Network (LAN)* internal fakultas dan departemen untuk menyempurnakan jaringan dalam kampus secara keseluruhan.
- b. Peningkatan akses mahasiswa dan civitas akademika lainnya terhadap informasi melalui LAN dan internet
- c. Pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIMAK) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

9. Pembangkitan Pendapatan

- a. Penyusunan direktori dan bahan promosi yang memuat hasil invensi sebagai bentuk pemasaran paten hasil temuan civitas academica IPB.
- b. Penataan unit-unit usaha penunjang yang melayani kebutuhan warga Kampus Darmaga agar lebih tertib.

III. REVISI ANGGARAN

1. Revisi Anggaran Pendapatan

Posisi kas/setara kas pada awal tahun 2005 tercatat Rp 13,307 milyar, yaitu terdiri dari dana abadi, deposit asrama, dana PPKM, dana penyelenggaraan program, kompensasi dari Ekalokasari Plaza, dan piutang. Dalam RKAT 2005 (Revisi), angka posisi kas/setara kas ini tetap sama seperti yang disebutkan dalam RKAT 2005 semula. Selanjutnya, dalam RKAT 2005 semula disebutkan bahwa anggaran pendapatan IPB selama tahun 2005 adalah sebesar Rp 310,57 milyar. Angka ini direvisi menjadi Rp 279,68 milyar atau turun menjadi 90,1%. Dengan demikian, seluruh dana dalam RKAT 2005, yaitu posisi kas/setara kas awal tahun ditambah dengan pendapatan dalam tahun 2005 menjadi Rp 292,987 milyar.

Penurunan angka pendapatan tersebut adalah karena diperkirakan terjadi penurunan pendapatan dari Dana Masyarakat (DM), walaupun pendapatan dari Pemerintah mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan dari Pemerintah adalah pada komponen dana yang diperoleh dari DIPA Departemen Pendidikan Nasional yaitu dari Rp 8,834 milyar menjadi Rp 12,834 milyar. Hal ini karena disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas kampus yang sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, yaitu sebesar Rp 4 milyar.

Penurunan anggaran pendapatan dari DM disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penurunan pendapatan SPP, lingkungan pengadaan jasa konsultansi masih belum kondusif, dan kondisi terakhir kinerja usaha komersial yang belum menggembirakan. Pendapatan dari SPP seluruh strata pendidikan direvisi dari Rp 69,1 milyar menjadi Rp 60,934 milyar. Hal ini merupakan dampak dari penurunan jumlah mahasiswa baru yang diterima pada program pasca sarjana, baik reguler, penyelenggaraan khusus, maupun MMA.

Pendapatan yang berasal dari kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat, direvisi dari Rp 74,79 milyar menjadi Rp 55,332 milyar. Penurunan jumlah pendapatan yang cukup besar ini adalah merupakan antisipasi dari kondisi lingkungan pengadaan jasa konsultansi yang belum kondusif. Namun demikian, dari segi finansial penurunan ini tidak mengganggu keseluruhan program IPB, karena sifat dari pendapatan ini adalah

bahwa hampir seluruh dana yang diperoleh digunakan secara langsung untuk kegiatan jasa konsultansi tersebut.

Angka pendapatan dari usaha komersial direvisi dari Rp 7,756 milyar menjadi Rp 1,901 milyar. Hal ini karena pendapatan dari PT. Indah Pesona Bogor diperkirakan turun dari Rp 1,9 milyar menjadi Rp 1,8 milyar, sedangkan dari PT. Bogor Life Science and Technology yang semula direncanakan Rp 5,85 milyar diperkirakan tidak akan ada. Pendapatan dari PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri yang semula tidak direncanakan ternyata diperkirakan akan diperoleh sebesar Rp 101 juta. Rencana awal anggaran pendapatan tahun 2005 dan revisinya disajikan dalam **Tabel 1**. Rincian anggaran pendapatan disajikan dalam **Lampiran 1**.

Tabel 1. Rencana Awal dan Revisi Anggaran Pendapatan Tahun 2005

No.	Sumber Pendapatan	Rencana Awal 2005		Revisi 2005	
		(Rp. ribu)	(%)	(Rp. ribu)	(%)
A.	Posisi Awal Tahun	13.307.833	4,11	13.307.833	4,54
	1. Kas	12.333.894	3,81	12.333.894	4,21
	2. Piutang	973.939	0,30	973.939	0,33
B.	Pendapatan Tahun Berjalan	310.570.205	95,89	279.680.138	95,46
	1. Dana Pemerintah	127.344.124	39,32	131.344.124	44,83
	1). Eks. Anggaran Rutin IPB	79.701.388	24,61	79.701.388	27,20
	2). Eks. Anggaran Pembangunan IPB	38.808.160	11,98	38.808.160	13,25
	3). Eks. Anggaran Pembangunan Depdiknas	8.834.576	2,73	12.834.576	4,38
	2. Dana Masyarakat	183.226.081	56,57	148.336.014	50,63
	1). SPP	69.100.000	21,33	60.934.344	20,80
	2). Non SPP	31.579.293	9,75	30.168.647	10,30
	3). Kerjasama PPM.	74.790.000	23,09	55.332.023	18,88
	4). Usaha Komersial	7.756.788	2,40	1.901.000	0,65
	Jumlah Keseluruhan (A dan B)	323.878.038	100,00	292.987.971	100,00

Pendapatan dari usaha komersial ditujukan untuk membiayai program-program baru, yaitu dalam pengembangan *performance-based budgeting* dengan penyediaan dana pendamping terhadap fakultas/departemen/unit kerja yang memenangkan Program Hibah Kompetitif (PHK), peningkatan kinerja penelitian dengan penyediaan dana untuk kegiatan penelitian payung IPB, pengembangan sistem insentif terhadap kinerja pegawai, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Rendahnya capaian pendapatan dari usaha komersial sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Walaupun terjadi penurunan bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan semula sebagaimana disebutkan dalam RKAT 2005, angka pendapatan yang direvisi ini masih lebih besar Rp 35,391 milyar atau 14 % dibandingkan dengan realisasi pendapatan selama tahun 2004. Perbandingannya anggaran pendapatan tahun 2005 (revisi) dengan realisasi pendapatan tahun 2004 disajikan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2005 (Revisi) dan Perbandingannya dengan Realisasi Tahun 2004

No.	Sumber Pendapatan	Realisasi 2004		Revisi 2005	
		(Rp. ribu)	(%)	(Rp. ribu)	(%)
A.	Posisi Awal Tahun	22.256.035	8,35	13.307.833	4,54
	1. Kas	22.256.035	8,35	12.333.894	4,21
	2. Piutang	-	-	973.939	0,33
B.	Pendapatan Tahun Berjalan	244.288.889	91,65	279.680.138	95,46
	1. Dana Pemerintah	119.103.815	44,68	131.344.124	44,83
	1). Eks. Anggaran Rutin IPB	61.098.876	22,92	79.701.388	27,20
	2). Eks. Anggaran Pembangunan IPB	38.673.509	14,51	38.808.160	13,25
	3). Eks. Anggaran Pembangunan Depdiknas	19.331.430	7,35	12.834.576	4,38
	2. Dana Masyarakat	125.185.074	46,97	148.336.014	50,63
	1). SPP	66.435.707	24,93	60.934.344	20,80
	2). Non SPP	21.584.253	8,10	30.168.647	10,30
	3). Kerjasama PPM.	36.965.113	13,86	55.332.023	18,88
	4). Usaha Komersial	200.000	0,08	1.901.000	0,65
	Jumlah Keseluruhan (A dan B)	266.544.924	100,00	292.987.971	100,00

2. Revisi Anggaran Belanja

Revisi anggaran belanja kegiatan perlu dilakukan untuk menyeimbangkan anggaran belanja kegiatan terhadap anggaran pendapatan terkoreksi (*revised*). Anggaran belanja kegiatan yang bersumber dari pemerintah adalah sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah disetujui, sedangkan anggaran belanja kegiatan yang berasal dari Dana Masyarakat perlu disesuaikan dengan anggaran pendapatan yang direvisi. Pengurangan anggaran belanja kegiatan dari rencana semula dilakukan pada kegiatan yang direncanakan akan dibiayai dari anggaran pendapatan Usaha Komersial.

Walaupun sebenarnya tidak ada *blocking* antar anggaran pendapatan dan belanja, tetapi untuk mempermudah dalam memahami keseimbangan pendapatan dan belanja dapat dikemukakan bahwa beberapa anggaran belanja yang baru dapat dilaksanakan bila pendapatan usaha komersial memadai. Anggaran belanja yang baru antara lain adalah penyediaan dana pendamping untuk Program Hibah Kompetitif (PHK), penelitian payung IPB, insentif bagi tenaga penunjang berdasarkan kinerja, pemberian jaminan asuransi kesehatan tambahan selain Askes untuk PNS, pemberian THR untuk pegawai. Rendahnya pendapatan dari kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat hanya berpengaruh terhadap volume kegiatan tetapi tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan manajemen institusi. Rendahnya pencapaian rencana pendapatan juga dibarengi dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM dan harga-harga lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian.

Anggaran belanja tahun 2005 yang semula sama dengan anggaran pendapatan, yaitu Rp 310,57 milyar direvisi menjadi Rp 281,889 milyar. Anggaran belanja ini Rp 2,209 milyar

lebih besar dibandingkan dengan angka revisi anggaran pendapatan (Rp 279,68 milyar). Sesudah direvisi, anggaran tahun 2005 mengalami defisit Rp 2,209 milyar yang diambilkan dari posisi kas awal tahun 2005. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2004, revisi anggaran belanja tahun 2005 ternyata naik sebesar Rp 28,65 milyar atau 11%. Rencana awal anggaran belanja tahun 2005 yang berasal dari dana Pemerintah dan revisinya disajikan dalam **Tabel 3**, sedangkan untuk Dana Masyarakat disajikan dalam **Tabel 4**. Selanjutnya, rincian rencana belanja disajikan dalam **Lampiran 2**.

Tabel 3. Rencana Awal dan Revisi Anggaran Belanja Tahun 2005 yang Berasal dari Dana Pemerintah

No.	Program Kerja	Rencana Awal 2005		Revisi 2005	
		(Rp. ribu)	(%)	(Rp. ribu)	(%)
1.	Peningkatan Manajemen Institusi	39.151.585	30,74	39.102.580	29,77
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	84.448.893	66,32	88.497.898	67,38
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	1.204.720	0,95	1.204.720	0,92
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	323.400	0,25	323.400	0,25
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	-	-	-	-
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	1.015.526	0,80	1.015.526	0,77
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	1.200.000	0,94	1.200.000	0,91
9.	Pembangkitan Pendapatan	-	-	-	-
10.	Pengeluaran Non Program	-	-	-	-
Jumlah Anggaran Belanja dari Dana Pemerintah		127.344.124	100,00	131.344.124	100,00

Tabel 4. Rencana Awal dan Revisi Anggaran Belanja Tahun 2005 yang Berasal dari Dana Masyarakat

No.	Program Kerja	Rencana Awal 2005		Revisi 2005	
		(Rp. ribu)	(%)	(Rp. ribu)	(%)
1.	Peningkatan Manajemen Institusi	19.967.470	10,90	20.334.020	13,51
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	72.854.011	39,76	63.107.680	41,92
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	69.675.500	38,03	55.615.186	36,94
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	8.609.000	4,70	3.798.736	2,52
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	5.883.000	3,21	3.943.466	2,62
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	300.000	0,16	-	-
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	650.000	0,35	1.255.000	0,83
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	987.100	0,54	791.500	0,53
9.	Pembangkitan Pendapatan	150.000	0,08	185.100	0,12
10.	Pengeluaran Non Program	4.150.000	2,26	1.515.000	1,01
Jumlah Anggaran Belanja dari Dana Masyarakat		183.226.081	100,00	150.545.688	100,00

a. Belanja Operasional

Belanja operasional tahun 2005 direvisi dari Rp 290,58 milyar menjadi Rp 263,913 milyar. Bila dibandingkan dengan rencana awal terjadi penurunan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2004 terjadi peningkatan cukup besar. Rencana awal anggaran belanja operasional tahun 2005 dan revisinya disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5. Rencana Awal dan Revisi Belanja Operasional Tahun 2005

No.	Program Kerja	Rencana Awal 2005		Revisi 2005	
		(Rp. ribu)	(%)	(Rp. ribu)	(%)
1.	Peningkatan Kualitas Manajemen Institusi	56.912.099	19,59	57.838.774	21,92
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	144.885.314	49,86	138.859.058	52,62
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	70.880.220	24,39	56.819.906	21,53
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	8.609.000	2,96	3.798.736	1,44
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	6.206.400	2,14	4.266.866	1,62
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	300.000	0,10	-	-
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	-	-	10.000	0,00
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	987.100	0,34	720.000	0,27
9.	Pembangkitan Pendapatan	150.000	0,05	185.100	0,07
10.	Pengeluaran Non Program	1.650.000	0,57	1.415.000	0,54
Jumlah Anggaran Belanja Operasional		290.580.133	100,00	263.913.440	100,00

Selain biaya-biaya yang secara rutin dikeluarkan, biaya operasional juga meliputi biaya untuk kegiatan penyiapan sistem mutu, perumusan kurikulum mayor-minor, dana pendamping (*counter budget* atau dikenal juga sebagai DRK) terhadap dana hibah yang dimenangkan. Selain itu, terdapat juga belanja berbentuk pemberian insentif finansial kepada tenaga penunjang dalam rangka peningkatan kinerja yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap bulannya. Belanja operasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai juga meliputi pembayaran premi asuransi kesehatan tambahan untuk rawat inap.

b. Belanja Investasi

Rencana belanja investasi pada tahun 2005 yang semula Rp 19,84 milyar direvisi menjadi Rp 17,976 milyar. Nilai belanja investasi sesudah revisi adalah lebih kecil dari rencana belanja dalam RKAT 2005 (**Tabel 6**). Selain investasi dengan dana yang berasal dari pemerintah, yaitu melalui Program Hibah Kompetitif (PHK) SP4 dan DUE-like, dan ABT terdapat juga investasi menggunakan dana dari masyarakat. Kelompok belanja investasi terbesar adalah dalam rangka program peningkatan kualitas pendidikan, yaitu sebesar Rp 12,746 milyar yang meliputi rehabilitasi sedang/berat gedung pendidikan, pengadaan peralatan pendidikan, peremajaan alat laboratorium, pengadaan buku perpustakaan dan jurnal. Investasi dari anggaran belanja PHK adalah berupa peralatan pendidikan dan penelitian. Pembangunan gedung dan fasilitas pendukungnya yang dibiayai dengan Dana Masyarakat adalah wing Departemen Fisika dan rehabilitasi gedung pendidikan program diploma.

Tabel 6. Rencana Awal dan Revisi Belanja Investasi Tahun 2005

No.	Program Kerja	Rencana Awal 2005		Revisi 2005	
		(Rp. ribu)	(%)	(Rp. ribu)	(%)
1.	Peningkatan Kualitas Manajemen Institusi	2.206.956	11,12	1.597.826	8,89
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	12.417.590	62,59	12.746.520	70,91
3.	Peningkatan Kualitas Penelitian	-	-	-	-
4.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-
5.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM	-	-	-	-
6.	Peningkatan Manajemen Keuangan	-	-	-	-
7.	Peningkatan Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur	1.515.526	7,64	2.260.526	12,57
8.	Peningkatan Manajemen Informasi dan Komunikasi	1.200.000	6,05	1.271.500	7,07
9.	Pembangkitan Pendapatan	-	-	-	-
10.	Pengeluaran Non Program	2.500.000	12,60	100.000	0,56
Jumlah Anggaran Belanja Investasi		19.840.072	100,00	17.976.372	100,00

IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

1. Komponen Pajak

Anggaran belanja yang diuraikan di atas sudah termasuk komponen pajak, sehingga bendaharawan IPB dapat langsung memotong pajak dari para wajib pajak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan menyetorkannya ke negara.

2. Sifat Dana dari Pemerintah

Peningkatan pendapatan yang berasal Pemerintah pada tahun 2005 tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang mendesak untuk dibiayai, karena anggaran pendapatan dari pemerintah bersifat *itemized* dan *restricted*, yang berarti anggaran harus digunakan sesuai dengan Pos Belanja yang telah ditetapkan. Berhasilnya upaya efisiensi anggaran dari Pemerintah tidak dapat secara langsung digunakan untuk keperluan lain di luar Pos Belanjanya, melainkan terbatas pada memaksimalkan penggunaan pagu anggaran yang disediakan sehingga diperoleh volume fisik yang lebih tinggi.

3. Perkiraan Pendapatan

Beberapa sumber pendapatan masih sulit diperkirakan, yaitu pendapatan dari kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat dan pendapatan dari usaha komersial. Pendapatan dari kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung kepada keberhasilan dalam kompetisi pada proses pengadaan jasa konsultansi. Usaha komersial yang dilaksanakan oleh PT BLST masih bersifat rintisan dan belum menggunakan "*blue print*" yang jelas, sehingga estimasi anggaran pendapatan sulit dilakukan secara baik.

4. Penggunaan Rekening Penerima

Belum seluruh penerimaan anggaran pendapatan yang bersumber dari kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tercatat di rekening rektor. Selain itu,

anggaran pendapatan yang bersumber dari SPP Program Pendidikan Non-reguler (penyelenggaraan khusus) dan pendapatan dari usaha-usaha penunjang (*auxiliary enterprises*) juga belum seluruhnya menggunakan rekening rektor. Kondisi tersebut menyebabkan monitoring, evaluasi dan pengendalian anggaran belanja dan investasi tidak dapat dilakukan dengan baik.

5. Belanja Daya dan Jasa

Dana Masyarakat yang diperoleh pada tahun 2005 sebagian digunakan untuk membiayai belanja kebutuhan rutin yang belum dapat dipenuhi secara memadai dari anggaran pendapatan yang berasal dari pemerintah, yaitu terutama untuk belanja daya dan jasa serta pemeliharaan gedung yang terus meningkat karena meningkatnya tarif dan biaya yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

6. Ukuran Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005 belum menggunakan rencana ukuran-ukuran kinerja luaran yang dapat terukur dengan jelas (*measurable output indicators*), sehingga penggunaan anggaran pendapatan untuk belanja dan investasi sulit digunakan dalam menilai akuntabilitas kinerja sebenarnya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Oktober 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng